

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Apeldoorn, LJV (2004) Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Pradnya Paramita
- Ardika, IG. (2018). Kepariwisata Berkelanjutan : Rintis Lewat Komunitas. Jakarta : Kompas Media Nusantara
- Antariksa, B. (2018) Kebijakan Pembangunan Sadar Wisata : Menuju Daya Saing Kepariwisata Berkelanjutan. Malang : Intrans Publishing
- Budiono, H. (2006). Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Suratman & Dillah, P. (2022). Metode Penelitian Hukum. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Kansil, C. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka
- Hadikusuma, H. (2013). Bahasa Hukum Indonesia. Bandung : PT ALUMNI
- Hadiwijoyo, SS. (2012). Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat : Sebuah Pendekatan Konsep. Yogyakarta : Suluh Media
- Hadiwijoyo, SS. (2012). Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Edisi Pertama Cetakan Pertama. Yogyakarta : Suluh Media
- Hadjon, P. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya : Bina Ilmu
- Hasan, AM. (2009). Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum. Jakarta: Fikahati Aneska
- Huda, N. (2015). Hukum Pemerintahan Desa : Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi. Malang : Setara Press
- Ibrahim, J. (2009). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya : PT Bayumedia
- Iskandar, AH. (2020). SDGs Desa : Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Istiyani, AD. (2021) Menggali Potensi Desa Wisata : Mewujudkan Masyarakat Sadar Wisata. Yogyakarta : Hijaz Pustaka Mandiri
- Marzuki, PM. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenda Media
- Mertokusumo, S. (1993) Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti

- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret
- Notohamidjojo, O. (2011) *Soal Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga : Griya Media
- Nugroho, RD. (2003) *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Desa Wisata Edisi II*. Jakarta : Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum Cetakan ke-8*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Sansongko, W. (2007). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Lampung : Universitas Lampung.
- Santiago, F. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta : UI Press
- Soekanto, S. dan Mamudji. (2000). *Penelitian Hukum Normatif Satu Tinjauan Singkat Cetakan 2*. Jakarta : PT Radja Grafindo Persada
- Soetiono. (2004). *Supremasi Hukum*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret
- Suharto, DG. (2019). *Membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No 5/1979, UU No 22/1999, & UU No 32/2004 serta Perspektif UU No 6/2014)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia Cetakan I*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media
- Terry, G. (2009). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : Penerbit Bumi Akera
- United Nations World Tourism Organization. (2013). *Sustainable Tourism for Development Guidebook*. Spanyol : United Nations World Tourism Organization
- Widia, IK. (2021). *Hukum Kepariwisata*. Malang : PT Cita Intrans Selaras
- Yoeti, OA. (2016). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata Cetakan Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka

B. Jurnal

Costa, J et al. (2019) “Sustainability of Tourism Destination and The Importance of Certification” Worldwide Hospitality and Tourism Themes Vol 11 No 6. <https://doi.org/10.1108/WHATT-08-2019-0050>

Fitra, A dan Maharani, L (2001) Pengembangan Kepariwisata Berkelanjutan Jurnal Ilmu Pariwisata Volume 6 No 1

Indratanto, SP et al. (2020). “Asas Kepastian Hukum dalam implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 No 1

Tjitrawati, AT, Amalia, R., dan Hamdan, FZZ Hamdan. (2022). “Legalitas Perizinan Kawasan Wisata Sebagai Upaya Pengembangan Desa Wisata” Media Iuris Vol 5 No 1.

Yahya, A. dan Agustina, RE. (2022). “Pembangunan Desa dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten di Indonesia” Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan Volume 6 No 1.

Habibie, F. et al.. (2021). “Pelatihan dan Penyuluhan Sertifikasi Desa Wisata di Desa Cibuntu” Jurnal Pemberdayaan Pariwisata Volume 3(2). <https://doi.org/10.30647/jpp.v30647/jpp.v3i2.1599>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025

Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM 04/UM 001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata

Surat Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No KM.143/KD.00/MENPAR/2019 tentang Dewan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Indonesia

D.Website

Global Sustainable Tourism Council,-, “Global Sustainable Tourism Council (GSTC)”, diakses pada tanggal 13 Juni 2023 <https://www.oneplanetnetwork.org/organisations/global-sustainable->

[tourism-council-gstc#:~:text=The%20GSTC%20is%20an%20independent,sustainability%20in%20travel%20and%20tourism.](#)

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia,-, IST-Council Indonesia Sustainable Tourism Council. <https://ist-council.kemenparekraf.go.id>

Mujahir, A. (26 April 2019). Nasib Jatiluwih Setelah Menjadi Warisan Budaya [1]. <https://www.mongabay.co.id/2019/04/26/nasib-jatiluwih-setelah-menjadi-warisan-budaya-dunia-1/>

Mujahir, A. (27 April 2019). Nasib Jatiluwih Setelah Menjadi Warisan Budaya [2]. <https://www.mongabay.co.id/2019/04/27/nasib-jatiluwih-setelah-menjadi-warisan-budaya-dunia-2/>

Suriyani, LD. (26 April 2015). Beginilah Nasib Subak di Bali. <https://www.mongabay.co.id/2015/04/06/beginilah-nasib-subak-di-bali/>

United Nations World Tourism Organization. -.EU Guidebook on Sustainable Tourism For Development. <https://www.unwto.org/EU-guidebook-on-sustainable-tourism-for-development>

Widi, S. (28 Desember 2022). “Pendapatan Devisa Pariwisata Indonesia Melejit pada 2022”, diakses pada tanggal 12 Maret 2023 <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/pendapatan-devisa-pariwisata-indonesia-melejit-pada-2022>

Yudha, V. (12 September 2019). Aturan Pembentukan Pokdarwis. <https://www.desabisa.com/aturan-pembentukan-pokdarwis/>

Dokumen

Buana, Mirza Satria. (2010). “Hubungan Tarik Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi” Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia